

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja bantuan sosial pada Pemerintah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango selama tahun 2010-2014. Nilai t positif menunjukkan bahwa semakin besar rasio kemandirian daerah maka semakin besar juga belanja bantuan sosial pemerintah.
2. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja bantuan sosial pada Pemerintah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango Periode 2010-2014. Nilai t positif menunjukkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan terjadi kenaikan pula pada Belanja bantuan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah.
3. Rasio kemandirian dan ukuran pemerintah daerah secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Belanja bantuan sosial Pemerintah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango Periode 2010-2014. Kemudian nilai koefisien determinasi sebesar 21,15% menunjukkan besar pengaruh dari rasio kemandirian dan ukuran pemerintah terhadap belanja bantuan sosial.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah terus berupaya untuk melakukan peningkatan pada sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dapat dilakukan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Sehingga dengan cara ini maka akan berdampak pada besarnya rasio kemadirian Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
2. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bone Bolango berupaya untuk meningkatkan ukuran pemerintah daerah yakni dengan cara mengelolah administrasi pemerintahan sehingga setiap target dapat tercapai kemudian dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat agar jumlah penduduk yang besar turut memberikan sumbangan baik bagi peningkatan pendapatan penduduk.
3. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bone Bolango melibatkan semua elemen pemerintahan dalam penentuan APBD sehingga tidak adanya simetri informasi yang berdampak pada ketidakakuratan penentuan anggaran pada suatu periode.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi dan Pengendaliani Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Abdul Halim, 2008, *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*, UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Abdul Halim, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi 3*. Jakarta Salemba Empat.
- Ardhini, 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektik Teori Keagenan. *Jurnal hal 9-11: Universitas Diponegoro*. Semarang
- \_\_\_\_\_, 2002, *Akuntansi Sektor Pablik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba 4.
- Bastian, Indra, 2001, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakrta : Salemba Empat.
- Cohen, S and N Kaimenakis. 2008. An Empirical investigation of Greek Municipalities Quality of Financial Reporting. Working paper series.
- Darmastuti, Dewi & Dyah Setyaningrum. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2009*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan IV Penerbit UNDIP.
- Government finance statistics manual 2001.
- Governmental Accounting Standard Boards (GASB). 1994. *Concepts Statement No. 2 Service Efforts and Accomplishments*.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Anasis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2009). *Ekonometrika, teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim Abdul, et.al. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Henriksen, 1989, *Tekhnik Analisa Keuangan*, PT.Erlangga, Jakarta.
- Hilmi, A.Z. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 2006-2009. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ihyaul Ulum M.D. 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Ingram, R. W. (1984). Economic Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices. *Journal of Accounting Research* , Vol. 22 Depok.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Buletin Teknis No. 04 Tahun 2007 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Buletin Teknis No. 10 Tahun 2011 Tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial
- Lesmana, Sigit I, 2010, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia. Thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Liestiani, Annisa. 2008. *Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Nordiawan dan Hertianti, 2010, *Akuntansi Sektor Pablik Edisi Ke-2*, Jakarta.
- Mamesah,D.J, 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Nordiawan, Deddi Dan Ayuningtyas Hertianti, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Jakarta : Salemba Empat, 2010

Nurcholis. 2007. *Pengertian dan Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah*.artikel Sabtu 23 Juni 2012.

Patrick, P. A. (2007). The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government. *Ph.D. dissertation*, The Pennsylvania State University, United States– Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No. AAT 3266180).

\_\_\_\_\_, Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah.

Robbin Wa, Austin KR, 1986, Disclosure quality in governmental financial report: an assessment of the appropriateness of a compound measure, *Jurnal of Accounting Research* 24(2)412-421.

Sumarjo H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia) *Skripsi sarjana yang tidak dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Suhardjanto, Djoko dan Yulianingtyas, Rukmina, Rena, 2011, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan pengungkapan Wajib Dalam Laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia, Jurnal Akuntansi dan Auditing, Volume 8, 1-94.

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, Kualitatif, dan R & D, CV. Bandung: Alfabeta.

Suwardjono, 2008, Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan, BPFE, Yogyakarta.

Suripto, Bambang 1999, Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan. Simposium Nasional Akuntansi II.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bandung : Kuraiko Pratama.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No 40 Tahun Tetang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

\_\_\_\_\_, Undan-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wahyuni. N, 2007. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal Akuntansi*. Malang

Winarna, Jaka., dan Murni, Sri. 2007. Pengaruh Personal Backgroun Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawaasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah latimewa Yogyakarta Tahun 2006). *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*.

Yusran Lapananda, 2013, Hibah Dan Bantuan Sosial (Bersumber dari APBD), Sinar SGrafika, Jakarta.

<http://www.gorontalo.bpk.go.id/?p=975>.

<http://acch.kpk.go.id/>.